



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : REPELITA KALLO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 884169

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	370.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	135.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS VVT-I 1,5 G Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	150.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>505.150.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>505.150.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnp.kpk.go.id](http://elhkpnp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnp.kpk.go.id](http://elhkpnp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RADEN DWI TEGUH WIJANARKO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 633352

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	420.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 380.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	61.500.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BY8A/T125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>482.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>140.240.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.760.000</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUH. NUR
2. Jabatan : BENDAHARA PENGETAHUAN
3. NHK : 500733

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	204.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 989 m <sup>2</sup> /70 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 19.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 989 m <sup>2</sup> /70 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 185.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	400.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	15.000.000
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>225.440.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>295.200.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>-69.760.000</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

### Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF  
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

#### I. DATA PRIBADI

- Nama : WAWAN JUNAEDI
- Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
- NHK : 1010952

#### II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	46.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>60.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>303.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>-243.000.000</b>

#### Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](#). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](#), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

BIDANG : EKSEKUTIF  
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN  
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : CHICILIA IRIANI RAYO
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 893938

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	454.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m <sup>2</sup> /19 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 252.500.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m <sup>2</sup> /14 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 202.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	137.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 2SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA B401RA-GMZFJ(CALYA 1.2 G M/T)/MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.670.823
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>608.870.823</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>340.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>268.870.823</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.